



BAWASLU DALAM DINAMIKA PEMILU: SEJARAH, STRUKTUR, KOLABORASI DAN TANTANGAN

Dr. Insyira Yusdiawan Azhar, S.IP., M.Sos.
Ashviea Aliefatul Muhaida
Putri Ayu Salsabila
Septi Nur Rizqi
Izza Nikmatul Fitri



BAWASLU DALAM DINAMIKA PEMILU:

Sejarah, Struktur, Kolaborasi
dan Tantangan

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAWASLU DALAM DINAMIKA PEMILU:

**Sejarah, Struktur, Kolaborasi
dan Tantangan**

Dr. Insyira Yusdiawan Azhar, S.IP., M.Sos.

Ashviea Aliefatul Muhaida

Putri Ayu Salsabila

Septi Nur Rizqi

Izza Nikmatul Fitri

**BAWASLU DALAM DINAMIKA PEMILU:
SEJARAH, STRUKTUR, KOLABORASI DAN TANTANGAN**

Penulis : Dr. Insyira Yusdiawan Azhar, S.IP., M.Sos.
Ashviea Aliefatul Muhaida
Putri Ayu Salsabila
Septi Nur Rizqi
Izza Nikmatul Fitri
Desain Cover : Syaiful Anwar
Sumber : <https://www.freepik.com>
Tata Letak : Salwa Alya Majid
Proofreader : M. Royfan Ardian

Ukuran:
xii, 92 hlm., Uk.: 15.5x23 cm

SIDN:
766-27-11-25-1917

Cetakan Pertama:
November 2025

Hak Cipta 2025 pada Penulis
Copyright © 2025 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

**PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
Jl. Rajawali, Gg. Elang 6, No. 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km. 9,3 – Yogyakarta 55581
Telp./Faks : (0274) 4533427
Website : www.penerbitdeepublish.com
www.deepublishstore.com
E-mail : cs@deepublish.co.id

Hak cipta dilindungi undang-undang.

*Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.*

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR PENERBIT

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku ***Bawaslu dalam Dinamika Pemilu: Sejarah, Struktur, Kolaborasi, dan Tantangan*** dapat terwujud dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebagai penerbit yang berkomitmen untuk mencerdaskan, membahagiakan, dan memuliakan umat manusia, kami merasa terhormat dapat berkontribusi dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan pendidikan melalui penerbitan karya ini.

Buku ini berisi landasan ilmu dan konseptual pemilu; sejarah pembentukan pengawas pemilu; catatan kerja sama Bawaslu dengan daerah; serta kasus-kasus yang terjadi selama pemilu. Buku ini tidak hanya membahas mengenai pemilu secara general tetapi juga mencakup praktiknya di lapangan.

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada tim penulis yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dan kontribusi penuh demi kesempurnaan buku ini. Kami berharap karya ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan keilmuan di Indonesia. Semoga buku ini tidak hanya menjadi sumber informasi yang berharga, tetapi juga menginspirasi pembacanya untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih baik.

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

KATA PENGANTAR

Diskursus mengenai pengawasan dalam pemilihan umum sebenarnya bukan menjadi studi yang baru dalam Ilmu Politik dan Pemerintahan. Freedom House pada tahun 2021 merilis hasil yang menunjukkan adanya penurunan nilai-nilai demokrasi pada sejumlah negara. Meskipun tidak menunjukkan secara langsung Pemilihan Umum sebagai variabel penurunan tersebut, namun masalah hak politik yang melekat pada Hak Asasi Manusia ternyata tidak sepenuhnya berjalan secara ideal. Konsep demokrasi secara sederhana merupakan gelanggang politik antar aktor politik yang memiliki kepentingan di dalamnya. Namun, pertarungan politik yang terjadi sebenarnya membawa pertarungan besar karena setiap keputusan pemimpin berdampak pada publik. Sehingga pertarungan pemilihan umum sering kali menjadi kajian yang menarik karena tidak hanya terdapat kontestasi peserta pemilu, namun juga tata kelola organisasi dari penyelenggara pemilu.

Secara teoretis, gagasan demokrasi dalam konteks pembagian kekuasaan pemerintahan terbagi pada tiga bentuk, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Media massa dianggap menjadi pilar keempat demokrasi yang bertugas mengawasi ketiga lembaga tersebut dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam konteks pemilu, tidak banyak studi yang secara khusus membahas pengawasan pemilu baik secara konseptual hingga praktis. Setidaknya terdapat tiga model pengawasan pemilu yang dijalankan oleh sebagian besar negara. Pertama, pengawas pemilu adalah penyelenggara pemilu itu sendiri. Model ini menjadikan lembaga penyelenggara pemilu bertugas ganda karena memiliki *jobdesk* dalam hal pemungutan suara sekaligus mengawasi berjalannya pemilu. Kedua, model negara yang menjadikan media massa sebagai “alat” dalam mengawasi berjalannya penyelenggaraan pemilu. Ketiga, model di mana penyelenggara pemilu dibagi lembaga yang bertugas untuk menangani pemungutan dan penghitungan suara dan lembaga lain yang bertugas untuk mengawasi pemilu.

Indonesia menganut model ketiga bagaimana lembaga yang bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara tidak menjadi satu otoritas dengan pengawas pemilu. Pemisahan lembaga otoritas penyelenggara pemilu tidak lepas dari faktor sejarah ketika era Orde Baru pihak penyelenggara yang berada pada rumpun eksekutif tidak menjadi lembaga independen karena masyarakat harus berhadapan dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Akibatnya adalah stabilitas politik tidak menjadikan legislatif bekerja mengawasi jalannya pemerintahan. Kredibilitas pemilu yang bersifat formalitas sekaligus menjadi pertaruhan politik di mana kebebasan individu berpolitik bahkan berserikat harus mempertaruhkan nyawa. Sehingga adanya lembaga pengawas pemilu yang bertugas secara khusus merupakan bentuk reformasi tidak hanya pada bentuk organisasi pemerintahan, namun juga reformasi di sektor pemilihan umum yang berpihak pada rakyat.

Namun tidak banyak buku yang membahas mengenai lembaga pengawas pemilu. Buku ini dirancang sebagai buku ajar dengan tujuan untuk membantu dosen dan mahasiswa terutama bagi program studi Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Publik, dan Ilmu Hukum untuk mengenal lebih dalam mengenai lembaga pengawas pemilu atau yang disebut dengan Badan Pengawas Pemilu. Buku ini sebenarnya menyajikan materi dengan beban setara 5x pertemuan atau bisa kurang dari itu, tergantung dari dosen dalam memberikan porsi pembahasan mengenai pengawasan terhadap pemilu.

Buku ini dapat disajikan dalam dua bentuk, teoretis dan praktis. Pada bagian pendahuluan buku ini menyajikan tidak hanya mengawali pembahasan mengenai pemilu, namun pembaca langsung disuguhkan pada landasan teoretis dan konseptual yang mendasari adanya pengawasan pada lembaga pemilu. Pembahasan awal ini cenderung agak berat karena menjadi dasar berpikir untuk memahami dunia demokratis pada tatanan keseimbangan antara penyelenggara yang melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara dengan pihak pengawas.

Kemudian pada bab kedua buku ini akan menyajikan catatan sejarah bagaimana awal mula Badan Pengawas Pemilu ini muncul serta perkembangan aturan yang diemban oleh lembaga ini. Pada bab ketiga buku ini kemudian akan membahas mengenai struktur hierarki dari organisasi Bawaslu. Bagian ini sekaligus membahas mengenai peran,

tugas, fungsi, dan wewenang internal organisasi baik dari pusat hingga di level bawah.

Kemudian pada bab keempat bagian buku ini menyajikan catatan kerja sama yang pernah dilakukan oleh Bawaslu terutama di daerah. Kerja sama di level daerah lebih banyak diulas tidak lain sengaja dipilih karena dalam tugas pengawasan, lembaga ini membutuhkan instansi lain dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengawas pemilu. Bagian ini menyajikan kerja sama yang dilakukan baik dengan instansi sesama pemerintahan atau *Government* (GO) dan instansi di luar pemerintahan atau *Non-Government Organization* (NGO).

Bab terakhir merupakan bagian khusus dari buku ajar ini karena menyajikan tidak hanya membahas jenis-jenis pelanggaran pemilu, namun juga disertasi kasus-kasus yang ditemui baik melalui wawancara dengan petugas pengawas lapangan atau melalui berita-berita yang berkaitan dengan tema bab. Bagian ini sekaligus memberikan paparan secara praktis bagaimana sebenarnya tantangan penyelenggara pemilu di lapangan ketika menghadapi berbagai jenis kasus pelanggaran selama proses.

Selain itu, setiap bab juga diberikan bahan evaluasi melalui soal *essay* yang menjadi pertanyaan bagi mahasiswa. Sehingga memudahkan dosen dalam melakukan evaluasi dan memberikan penilaian terhadap kemampuan mahasiswa. Meskipun demikian, buku ini memiliki sejumlah kekurangan sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk menyempurnakan buku ajar ini dalam memberikan wawasan pengetahuan dan ilmu bagi mahasiswa.

Ponorogo, 30 Maret 2025

Dr. Insyira Yusdiawan Azhar, M.Sos
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENERBIT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii

BAB I PEMILU DAN PENGAWASAN: PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN SIRKULASI ELITE DALAM POLITIK..... 1

A. KONSEPTUAL DEMOKRASI DAN SIRKULASI ELITE	1
B. PENYELENGGARAAN PEMILU DAN KONSEP PENGAWASAN PEMILU	6
EVALUASI PEMBELAJARAN.....	13

BAB II SEJARAH BERDIRINYA HINGGA PERKEMBANGAN SETIAP PEMILIHAN UMUM 14

A. SEJARAH PENGAWAS PADA PEMILU TAHUN 1982 (PEMBENTUKAN PANWASLAK).....	15
B. PERKEMBANGAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 1992 DAN 1997	17
C. PERKEMBANGAN PENGAWAS PEMILU PADA TAHUN 1999.....	17
D. PENGAWAS PEMILU TAHUN 2004-2008 (TRANSFORMASI MENJADI BAWASLU)	18
E. BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2009–2014	20
F. PERAN BAWASLU PADA PEMILU TAHUN 2019	23
G. PERAN BAWASLU PADA PEMILU TAHUN 2024	26
H. SELEKSI ANGGOTA KOMISIONER YANG DILAKUKAN SETELAH BAWASLU KABUPATEN/KOTA DIBENTUK	28

I. PENERAPAN ATURAN YANG BERBEDA PADA SETIAP PEMILIHAN UMUM.....	30
EVALUASI PEMBELAJARAN	33
BAB III STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU.....	34
A. STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU	34
B. PEMBAGIAN KEWENANGAN DARI PUSAT KE DAERAH	41
C. KOORDINASI DAN PENGAWASAN DI BAWASLU	42
D. PERAN, TUGAS, DAN FUNGSI MASING- MASING KOMISIONER	43
E. PENJELASAN MASING-MASING AKTOR PENGAWASAN DI LAPANGAN	48
EVALUASI PEMBELAJARAN	52
BAB IV KOLABORASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DENGAN AKTOR LAIN.....	53
A. SENTRA GAKKUMDU.....	53
B. AKADEMISI/KAMPUS.....	60
C. KOMUNITAS/MASYARAKAT/NGO.....	63
EVALUASI PEMBELAJARAN	67
BAB V MEKANISME DAN TANTANGAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU	68
A. JENIS-JENIS PELANGGARAN PEMILU	69
B. SOP DAN PENDEKATAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU	78
C. TANTANGAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM.....	81
EVALUASI PEMBELAJARAN	86
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Alur Seleksi Anggota Komisioner	28
Gambar 2	Struktur Bawaslu RI.....	36
Gambar 3	Struktur Bawaslu Provinsi.....	37
Gambar 4	Struktur Bawaslu Kabupaten/Kota.....	38
Gambar 5	Struktur Panwaslu Kecamatan	40
Gambar 6	Kelompok Orang dengan Kedudukan Setara dalam Bawaslu Kabupaten/Kota	44
Gambar 7	Struktur Gakkumdu.....	59
Gambar 8	Alur Penanganan Pelanggaran Kode Etik	71
Gambar 9	Alur Penanganan Pelanggaran Administratif	74
Gambar 10	Alur Penanganan Tindak Pidana pemilu	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Keuntungan dan Risiko Blockchain	84
---------	--	----